

KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL ALA KI HADJAR DEWANTARA

Mukodi

Dosen STKIP PGRI Pacitan
E-mail: mukodi@yahoo.com

Abstract:

There are two points in this research. First, there are lot of violence phenomena and the strained situation between the members of religious community in the society recently. Second, it has not found the way to solve the conflicts which is relevant to the Indonesians character. Related to the problems, the results of this study show that; 1) through multicultural teaching and learning method, the unique of human beings, such as the differences of religion or belief, race, culture, sex, physical aspects and peoples' economic status can be placed on the same level. 2) the multicultural educational concept of education in three centers of education by Ki Hajar Dewantara as one of the alternative application methods. Trough familial education, the parents teach their children for understanding the importance of having equal right among the ones who have different ethnic group, race, religion, belief, culture, social strata, and humanism values. At school, the teachers and academic staffs can teach the multicultural values of education which are systematic, academic, and controlled. In the society, the citizen or the members of the society can implement the feeling of awareness in the real life, related to the importance of seeing the differences of people without differencing the religion, belief, culture, sex, physical aspects and peoples' social status.

Key words:

Multicultural education, three centers of education, Ki Hadjar Dewantoro and James Banks.

Survei nasional yang dilakukan oleh Wahid Institute dan Indo Barometer (WI-IB) menemukan bahwa mayoritas Muslim (95,4%) menyadari pentingnya toleransi beragama untuk perdamaian di Indonesia dan banyak (51%) yang tidak setuju jika dikatakan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia kini menurun. Lebih jauh, untuk melihat sikap sosial, ada satu indikator dalam beberapa survei, nasional maupun internasional, yang cukup membantu, yaitu tentang kesediaan bertetangga dengan orang yang beragama lain. Survei Wahid Institute, menyebarkan pertanyaan "Dapatkah Muslim bertetangga dengan non-Muslim?" dijawab oleh mayoritas yang amat besar dengan "ya" (91,7%), sementara 6,3% menjawab "tidak". Dalam penelitian Saiful Mujani, jumlah responden yang menolak bertetangga dengan non-Muslim cukup banyak; untuk Kristen 16%, untuk Hindu dan Buddha 12% (yang menarik, ketaksediaan bertetangga tertinggi adalah dengan komunis, 84% (2007: 99).

Sayangnya, hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan beragam fakta kekerasan atas nama SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang dewasa ini terjadi, sebut saja kasus di Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997) juga di Ambon dan Maluku (1999) dan lainnya (Baca: Amin Abdullah, 2002: 6). Kerusakan penertiban makam

Mbah Priok (23 April 2010). Kasus kekerasan akibat penistaan agama di Temanggung (8 Februari 2011) dan masih banyak rentetan kasus serupa.

Pertikaian umat antar agama tersebut di atas, seolah menjadi pembenar bahwa masyarakat kita masih kurang memahami akan arti perbedaan. Padahal, plural itu hal yang kodrati. Kemajemukan budaya, bahasa, dan agama, yang terbalut dalam falsafah Bhineka Tunggal Ika, merupakan sumber daya luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman itulah yang menjadi sumber kekuatan yang besar, apabila bangsa Indonesia saling memperteguh semangat persatuan dan persaudaraan. Perbedaan pasti akan menjadi lebih indah bila kita mau membuka diri dan saling mengenal satu sama lain. Namun, perbedaan yang indah akan menjadi sebuah malapetaka, bila setiap individu, ataupun komunitas tertentu saling mengedepankan kepentingan primordial dan kepentingan individual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat dua hal yang harus mendapat perhatian. *Pertama*, maraknya fenomena kekerasan dan ketegangan antar umat beragama di masyarakat. *Kedua*, belum adanya model penyelesaian konflik antar agama yang sesuai dengan karakter dan jati diri Kebangsaan. Perlu dicari dan dirumuskan model penyelesaian konflik antar agama yang efektif untuk dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat. Dalam konteks itu, kajian ini berupaya mencari solusi aplikatif agar tindak kekerasan dan ketegangan antar agama tidak berkepanjangan. Konsep pendidikan berbasis multikultural ala Ki Hadjar Dewantara pun ditawarkan sebagai solusi alternatif. Tesisnya cukup mendasar, “karena esensi pendidikan multikultural adalah bentuk konkret dari kesadaran yang berkelanjutan. Maka, logikanya pendidikan multikultural harus dididik dan ajarkan di rumah, sekolah dan masyarakat secara integral dan simultan.” Di ranah inilah pendidikan multikultural sangat relevan diajarkan melalui konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, yakni di rumah, sekolah dan masyarakat. Harapannya, melalui kajian ini sikap saling asah, asih dan asuh dapat tumbuh dan berkembang di bumi nusantara ini.

Konsep Pendidikan Multikultural

Menurut Banks, (1993) pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. *“The term multicultural education (now) describes a wide variety of programs and practices related to educational equity, women, ethnic groups, language minorities, low-income groups, and people with disabilities”*.

Di sisi yang sama, menurut Zamroni (2011: 140) pendidikan multikultural merupakan bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang seoptimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan bakat yang dimilikinya. Seide dengan Banks, Sleeter dan Grant (1988) mendefinisikan pembelajaran multikultural sebagai kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegakkan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, kelas.

Lebih dari itu, pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang (Skeel, 1995). Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas (Liliweri, 2005).

Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan multikultural pada hakikatnya mencoba membantu menyatukan kesukuan, ras dan golongan secara lebih manusiawi, dengan menekankan pada perspektif pluralitas kemasyarakatan. Dengan demikian, sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai pluralitas. Kurikulum di persekolahan pun harus diracik sedemikian rupa. Aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek di mana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerja sama, dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya perlu dimasukkan.

Pendidikan berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual.

Pembelajaran Multikultural

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. (Farris & Cooper, 1994).

Menurut James Banks (2003), pendidikan multikultural setidaknya mengandung empat dimensi pokok. Pertama, *content integration*, yaitu upaya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/diisiplin ilmu. Kedua, *the knowledge construction process*, yaitu suatu metode/cara bagaimana membawa siswa memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (diisiplin). Ketiga, *an equity pedagogy*, yaitu usaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa yang beragam bagi dari segi ras, budaya ataupun sosial. Keempat, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam menciptakan budaya akademik.

Tujuan pendidikan berbasis multikultural di antaranya; (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok (Banks, dalam Skeel, 1995).

Di samping itu, pendidikan berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep pendidikan untuk kebebasan (Dickerson, 1993; Banks, 1994); yang bertujuan untuk: (1) membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; (2) memajukan kebebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain.

Konsep Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara Sistem Pendidikan dan Pengajaran

Sistem pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara mempunyai nilai-nilai filosofis yang mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada pandangan-pandangannya tentang pendidikan, baik pra kemerdekaan, maupun pasca kemerdekaan. Sistem Among adalah idenya untuk memonitor dan berkomunikasi dengan siswa didiknya. Dalam hal ini *sistem among* terdiri dua dasar, yaitu: **Pertama**, Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin, hingga dapat hidup merdeka (dapat berdiri sendiri). Adanya dasar kemerdekaan adalah dasar suatu usaha untuk mendidik murid-murid agar bersikap mental, serta bekerja keras dalam batas-batas tujuan mencapai tertib damainya hidup bersama. Dalam hal ini bukan hanya dikenakan pada sikap perilaku, tetapi dilaksanakan pula pada kebebasan anak-anak untuk berpikir; **Kedua**, Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sistem pendidikan cara lama yang menggunakan perintah, paksaan, dan hukuman harus diganti dengan sistem pendidikan yang berdasar pada kodrat alam. Anak didik baru dapat berkembang secara optimal apabila ia diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan pembawaan yang ada dalam dirinya (Media, Edisi Mei 1996: 39).

Sedangkan dasar pendidikan dan pengajaran dari Taman Siswa ialah “Panca Dharma Taman Siswa”, yang disusun pada tahun 1947. Dasar-dasar itu ialah: 1) asas kemerdekaan, maksudnya bahwa disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri, atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; 2) asas kodrat alam, berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam ini. Ia tidak bisa lepas dari kehendaknya, tetapi akan mengalami bahagia, jika bisa menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Karena itu, hendaklah tiap anak dapat berkembang dengan sewajarnya; 3) asas kebudayaan, hal ini tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan, tetapi pertama-tama membawa kebudayaan kebangsaan ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir batin. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menganjurkan untuk mengembangkan kebudayaan lokal dalam arti kebudayaan sendiri, di mana si anak tersebut tinggal; 4) asas kebangsaan. Maksudnya, tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, bahkan harus menjadi bentuk dan perbuatan kemanusiaan yang nyata. Jelasnya, tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju ke arah kebahagiaan lahir batin seluruh bangsa; 5) asas kemanusiaan. Artinya, menyatakan bahwa dharma tiap-tiap manusia itu adalah mewujudkan kemanusiaan, yang harus terlihat pada kesucian hatinya dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya.

Sistem Among

Prinsip kemandirian di dalam proses pendidikan dikembangkan dalam sistem among. Among atau *ngemong* mempunyai arti yang sangat mendalam dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan hakikat manusia yang tidak berdaya ketika dilahirkan. Namun demikian, ketidakberdayaan manusia merupakan suatu proses yang tertuju kepada kemandirian. Hal ini berarti dalam sistem among relasi antara pendidik dan peserta didik bukanlah merupakan relasi ketergantungan, tetapi suatu relasi yang semakin lama semakin memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiri sendiri (Tilaar dan Rian Nugroho, 2008: 52).

Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, pendidikan dengan “Sistem Among” memakai cara pondok-asrama, karena dengan cara itu dapatlah ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama-sama yaitu lingkungan keluarga, perguruan, dan perkumpulan pemuda. Persatuan ketiga corak lingkungan pendidikan tersebut penting sekali untuk sempurnanya pendidikan (Sistem Tri Pusat Pendidikan). Model Tri Pusat Pendidikan ini meliputi alam keluarga, alam perguruan (sekolah) dan alam pemuda (masyarakat). Alam keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Tugasnya adalah mendidik budi pekerti dan tingkah laku sosial. Alam perguruan merupakan pusat pendidikan yang berkewajiban untuk mengusahakan kecerdasan pikiran dan memberi ilmu pengetahuan. Alam pemuda merupakan pusat pendidikan yang membantu menuju kecerdasan jiwa maupun budi pekerti. Sistem pendidikan yang mengemukakan adanya tiga pusat pendidikan itulah yang dinamakan “Sistem Tri Pusat” (Soeratman, 1983/1984: 85).

Prinsip Kebudayaan

Menurut Ki Hadjar Dewantara, kebudayaan itu berarti buah budi manusia. Budi adalah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas dan mempunyai dua sifat yang istimewa, yaitu sifat luhur dan sifat halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai dengan pelajaran etika dan estetika. Kebudayaan juga bisa dimaknai sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia, yaitu dalam perjuangannya terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, yakni alam dan zaman, dalam perjuangan manusia tetap dan terus menerus berhasrat mengatasi segala pengaruh alam dan zaman yang menyukarkan hidupnya lahir dan batin, maka kebudayaan itu bersifat menggampangkan hidupnya serta memperbesar hasil hidupnya (Dewantara, 77, 54).

Bahkan Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa kebudayaan bukan hanya mengandung buah budi, tetapi juga memiliki arti memelihara dan memajukan. Dari sifat kodrati ke arah sifat kebudayaan. Itulah tujuan daripada segala usaha kultural. Acap kali suatu bangsa itu hanya mementingkan sifat keindahan atau kemegahan yang terdapat pada suatu benda kebudayaan (benda lahir atau batin) hingga lupa akan hubungan kebudayaan dengan masyarakat yang hidup pada suatu zaman. Banyak bentuk-bentuk kebudayaan yang sebenarnya telah terlepas daripada zaman dan alamnya, dari kodrat dan masyarakatnya, tidak berfaedah lagi bagi hidup manusia, akan tetapi masih tetap terus dipuji-puji (Dewantara, 77, 54).

Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Konsep Tri Pusat Pendidikan

Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara memang sulit dilaksanakan, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai langkah, strategi dan metode telah ditempuh, tapi hasilnya seolah masih jauh dari kata memuaskan. Menurut hemat saya, percepatan pemahaman dan pelaksanaan pendidikan multikultural dapat berjalan secara signifikan, jika konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dapat diterapkan. Mengapa demikian? Karena esensi pemahaman multikultural adalah

transformasi kesadaran diri. Dan kesadaran diri tersebut, dapat secara efektif di ajarkan secara simultan, mulai dari rumah, sekolah dan masyarakat. Adapun langkah dan strateginya sebagai berikut:

Pendidikan Berbasis Multikultural Di Rumah

Barangkali ada yang berpikir mungkinkah pendidikan multikultural diajarkan di rumah? Jawabnya, tentu sangat mungkin. Bahkan, bisa dikatakan wajib diajarkan. Keragaman suku, budaya, warna kulit, strata sosial, keyakinan dan nilai-nilai kemanusiaan sangat mungkin diajarkan dan didiskusikan di lingkungan keluarga. Apalagi, jika di dalam keluarga tersebut ada pembantu yang bekerja melayani keperluan keseharian mereka. Ia, bisa dijadikan contoh konkret bagaimana pembantu tersebut dihormati dan dipenuhi hak-haknya. Bahkan menurut Ki Hadjar Dewantara, alam (lingkungan) keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama kali bagi kehidupan anak-anak. Di alam keluarga, ada tiga bentuk pendidikan berlangsung. **Pertama**, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Ia berperan sebagai guru (penuntun), pengajar, dan pemimpin pekerjaan (pemberi contoh). Ketiga peran tersebut, menyatu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. **Kedua**, di dalam alam keluarga anak saling mendidik. Semakin keluarga itu besar, maka proses pendidikan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil keluarganya, maka proses pendidikan semakin kecil. **Ketiga**, di dalam alam keluarga, anak-anak berkesempatan mendidik dirinya sendiri, karena di dalam keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya seperti orang hidup di dalam masyarakat. Beragam kejadian, sering kali memaksa anak-anak mendidik diri mereka sendiri. (Dewantara, 1935: 377).

Berkaitan dengan ketiga domain tersebut, bukan tidak mungkin para orang tua dapat memerankan diri mereka sebagai penuntun multikultural yang baik. Di bilik-bilik ruang keluarga, pendidikan multikultural begitu sangat indah. Wujud nyatanya, sangat mudah dilaksanakan oleh semua kalangan. Adalah sebuah kelaziman, jika *democratic parents*, akan mengarah pada pengembangan *identity achievement*. (Zamroni, 6/5/2011). Persoalannya, tinggal mau atau tidak melaksanakan semua itu.

Pendidikan Berbasis Multikultural Di Sekolah

Masyarakat multikultural merupakan suatu realitas. Hampir tidak ada suatu masyarakat yang bersifat monokultur. Bahkan sejarah telah menunjukkan setiap upaya untuk menciptakan “monokultur” dengan berbagai macam bentuk telah gagal. Karena pada hakekatnya, masyarakat multikultur merupakan sunatullah (Zamroni, 2011: 31). Dengan alasan tersebut, tentu sangat rasional jika dunia persekolahan kita mencari format pendidikan yang *empan papan* bagi semua lapisan masyarakat. Khususnya, pendidikan yang dapat menghargai perbedaan suku, ras, agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat. Pendidikan multikultur pun bisa menjadi salah satu solusi alternatifnya.

Dalam konteks itu, James A. Banks (1993, 1994-a), mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yaitu: **Pertama**, dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan ‘poin kunci’ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri; **Ketiga**, dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku *intergroup* yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak *stereotype*, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan *teksbook* multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

Keempat, dimensi pendidikan yang sama, atau adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Dengan demikian, kelima dimensi tersebut sangat membantu proses pembelajaran di kelas. Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah dengan menggunakan pendekatan kajian kelompok tunggal (*Single Group Studies*) dan pendekatan perspektif ganda (*Multiple Perspectives Approach*). Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, harus tersedia data-data tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data tentang kontribusi kelompok itu terhadap perkembangan musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain harus dihadapkan pada siswa. Pendekatan ini terfokus pada isu-isu yang sarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji (Lubis Grafura, 2007: 10).

Sedangkan pendekatan perspektif ganda (*Multiple Perspectives*) adalah pendekatan yang terfokus pada isu tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif kelompok-kelompok yang berbeda. Pada umumnya, guru-guru memiliki berbagai perspektif dalam pembelajarannya. Dalam kaitan ini, Bannet dan Spalding (1992, dalam Lubis Grafura, 2007) menyarankan agar pembelajaran menggunakan pendekatan perspektif ganda, dengan alasan pendekatan itu nampak lebih efektif. Pendekatan perspektif ganda membantu siswa untuk menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain, di mana interpretasinya sering didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti. Solusi yang dianggap baik oleh suatu kelompok (karena solusi itu sesuai dengan nilai-nilainya), sering tidak dianggap baik oleh kelompok lainnya karena tidak cocok dengan nilai yang diikutinya (Savage & Armstrong, 1996). Keunggulan pendekatan perspektif ganda ini terletak pada proses berpikir kritis terhadap isu yang sedang dibahas sehingga mendorong siswa untuk menghilangkan prasangka buruk. Interaksi dengan pandangan kelompok yang berbeda-beda memungkinkan siswa untuk berempati.

Lebih dari itu, hasil penelitian (Byrnes, 1988) membuktikan bahwa siswa yang rendah prasangkanya menunjukkan sikap yang lebih sensitif dan terbuka terhadap pandangan orang lain. Mereka juga mampu berpikir kritis, karena mereka lebih bersikap terbuka, fleksibel, dan menaruh hormat pada pendapat yang berbeda (Walsh, 1988). Bahan pelajaran dan aktivitas belajar yang kuat aspek afektifnya tentang kehidupan bersama dalam perbedaan kultur terbukti efektif untuk mengembangkan perspektif yang fleksibel (Byrnes, 1988). Siswa yang memiliki rasa empati yang besar memungkinkan dia untuk menaruh rasa hormat terhadap perbedaan cara pandang. Tentu saja hal itu akan mampu mengurangi prasangka buruk terhadap kelompok lain. Membaca buku sastra multietnik dapat mengurangi *stereotype* negatif tentang budaya orang lain (Walker-Dalhouse, 1992). Pendekatan perspektif ganda mengandung dua sasaran yaitu meningkatkan empati dan menurunkan prasangka. Empati terhadap kultur yang berbeda merupakan prasyarat bagi upaya menurunkan prasangka.

Pertanyaan lanjutannya, bagaimana strateginya? Beragam strategi dapat digunakan, di antaranya strategi kegiatan belajar bersama-sama (*Cooperative Learning*), yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep (*Concept Attainment*) dan strategi analisis nilai (*Value Analysis*); strategi analisis sosial (*Social Investigation*). Beberapa Pilihan strategi ini dilaksanakan secara simultan, dan harus tergambar dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis multikultural. Namun demikian, masing-masing strategi pembelajaran secara fungsional memiliki tekanan yang berbeda. Strategi Pencapaian Konsep, digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi budaya lokal untuk menemukan konsep budaya apa yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut.

Strategi *cooperative learning*, digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam tataran belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi *cooperative learning*, diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang berbeda suku, agama etnis dan budayanya, memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan (*conflict non violent*).

Pendidikan Berbasis Multikultural Di Masyarakat

Transformasi masyarakat menuju pemahaman masyarakat multikultural menjadi keniscayaan. Apalagi, mencermati fenomena sosial kemasyarakatan belakangan ini sangat menyedihkan, kalau tidak dikatakan membahayakan. Khususnya, bagi keutuhan kebinekaan dan Kebangsaan kita. Beragam kekerasan, kerusuhan, konflik, dan anarkisme seolah tanpa putus. Sebut saja, kasus kekerasan warga dan aparat di PT Preport Papua, Mesuji Lampung, Sape di Bima Nusa Tenggara Barat dan lain sepadannya.

Parahnya lagi, masyarakat kita semakin menjauhi sifat kejujuran, akibatnya tidak ada lagi *trust* (kepercayaan) di antara mereka. Perkembangan lebih lanjut, suasana kekeluargaan dan persaudaraan sebagai satu bangsa sudah hampir punah, diganti dengan kebersamaan dan persaudaraan sempit yang berpusat pada keluarga (hubungan darah) atau kelompok. Musnahnya suasana kekeluargaan dan persaudaraan diiringi dengan menurunnya penghargaan atas martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna membawa nilai “kehidupan” manusia menjadi amat rendah (Zamroni, 2011: 92).

Tidak mudah memang mengembalikan nilai-nilai dan karakter Kebangsaan kita yang konon dikenal sebagai bangsa yang guyup, rukun, gotong royong, ramah tamah dan menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan (kebhinekaan). Tapi, kini karakter Kebangsaan itu mulai luntur dan menguap. Bahkan, sekarang bangsa kita lebih dikenal sebagai bangsa yang gemar “tawuran” dan kekerasan. Pendidikan multikultural pun bisa dijadikan salah satu bagian dari solusi alternatif untuk mengembalikan semangat Kebangsaan. Caranya bagaimana? Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong terwujudnya pendidikan multikultural di masyarakat.

Pertama, penyadaran akan pentingnya pemahaman multikultural bagi kehidupan masyarakat. Ini berarti masyarakat disadarkan tentang pentingnya memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah dan status ekonomi seseorang. Strategi percepatan penyadaran ini dapat dilakukan melalui beragam cara sebut saja misalnya, melalui penyuluhan-penyuluhan, khutbah-khutbah keagamaan, dan KKN Tematik multikultural perguruan tinggi. Di sisi yang sama, untuk mengatasi beberapa daerah yang berkonflik akibat isu SARA, perlu didorong kembali terwujudnya rekonsiliasi bermakna. Atau meminjam istilahnya Zamroni, rekonsiliasi yang memaafkan, tapi tidak melupakan kejadian masa lalu. Hal ini memang sulit dilaksanakan, namun harapan itu masih tetap terbuka lebar. Karena kodrat manusia adalah makhluk sosial, yang merindukan kedamaian dan ketenangan.

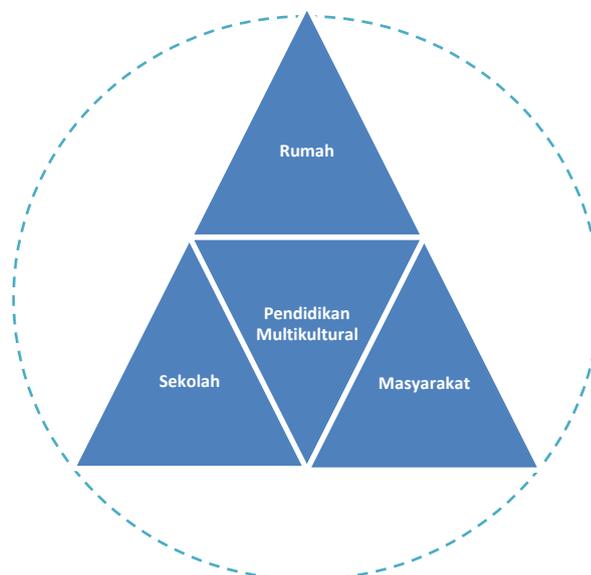
Kedua, adanya kebijakan desa berbasis multikultural. Kebijakan ini sebagai bentuk lanjutan dari penyadaran yang telah dilakukan, baik oleh aparat pemerintah, kaum agamawan, maupun sivitas akademika perguruan tinggi. Sehingga penyadaran tersebut, perlu dijaga, dipupuk dan dibuatkan konsensus bersama. Wujud konsensus kolektif itu, berupa kebijakan berbasis multikultural. Produk konsensus tentu tergantung kearifan lokal masing-masing desa/masyarakat. Contoh misalnya, kebijakan adanya forum kerukunan antar agama di desa, dibentuknya warung kerukunan beragama dan pemaksimalan program PMPM berasas kerukunan. Gagasan ini menjadi sangat relevan, mengingat berbagai kekerasan berbusanakan SARA biasanya teretas dari desa dan daerah. Dengan adanya, konsensus (kebijakan) ini, diharapkan dapat meminimalisir kekerasan atas nama SARA berkembang dan beranak pinak di negara seribu satu etnik ini.

Ketiga, memupuk semangat resiliensi berbasis multikultural. Upaya ini menjadi sangat penting dilakukan, karena untuk menjaga tumbuhnya kesadaran, konsensus kolektif berbasis multikultural, maka kedua hal itu perlu diikat. Sehingga dibutuhkan pengingat yang benar-benar kuat. Sangat bijak kiranya, tawaran Siti Irene Astuti untuk mengikat semangat multikultural dengan “tali resiliensi”. Mengapa demikian? Karena semangat resiliensi berarti adanya proses dinamis yang mengarah pada kemampuan yang positif untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang sulit (Luthar, dkk, 2000). Apalagi, semangat resiliensi ditumbuh kembangkan di masyarakat yang berkonflik. Sebab fungsi resiliensi di antaranya adalah mengatasi kesulitan-kesulitan yang pernah dialami di masa kecil, mewujudkan masa dewasa yang diinginkan, melewati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, bangkit kembali setelah mengalami kejadian traumatik atau kesulitan besar (Siti Irene Astuti D, 21/11/2011).

Secara praktis, tugas berat melaksanakan resiliensi ini pada hakikatnya adalah tanggung jawab semua warga. Sehingga warga masyarakat pun, harus dibekali pemahaman dan konsep resiliensi ini. Persoalannya siapa yang melakukan ini semua? Pertanyaan ini menjadi suatu kewajiban, karena resiliensi adalah konsep dan teori yang berat, tidak semua orang mampu melakukannya. Menurut hemat saya, perguruan tinggi melalui LPPM/LPM dapat menjadi pionir meretaskan ide dan gagasan mulia ini. Melalui pengabdian masyarakat, sekaligus sebagai realisasi perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi konsep resiliensi ini dapat segera didorong dan diwujudkan. Mengingat jumlah masyarakat yang membutuhkan kesadaran dan pemahaman resiliensi sangat banyak, maka perguruan tinggi perlu mengerahkan dosen dan mahasiswanya untuk melaksanakan tugas suci ini. Bentuknya, bisa saja perguruan tinggi mengadakan workshop, loka karya dan *TOT (Tranning of Tranner)* di desa-desa dan di kampung-kampung. Di samping itu, proyek proposal pengabdian masyarakat berbasis multikultural perlu diupayakan. Muaranya, tentu agar konsep resiliensi dapat dipahami oleh sivitas akademika dengan baik, kemudian “ditularkan” kepada lapisan masyarakat.

Dengan demikian, konsep pembelajaran multikultural model Tri Pusat Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara, yang meliputi proses pendidikan di rumah, di sekolah dan di masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I
Konsep Model Tri Pusat Pendidikan
Pembelajaran Multikultural Ki Hadjar Dewantara



Keterangan: -- -- -- bermakna sebagai tali ikatan bersifat integral dan komplementer saling mendukung satu sama lainnya.

Gambar tersebut di atas, memberi makna bahwa pendidikan multikultural model Tri Pusat Pendidikan harus dilaksanakan secara sinergi dan simultan. Tujuannya, agar hasilnya dapat efektif dan signifikan. Adapun implikasi Konsep Pendidikan Multikultural Model Tri Pusat Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara adalah sebagai berikut:

Tabel I
Implikasi Pendidikan Multikultural

| Implikasi Pendidikan Multikultural ala Ki Hadjar Dewantara | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|
| No | Bentuk Pendidikan | Ajaran | Metode | Dampak Perubahan |
| 1 | Rumah | Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal: Melalui kedua orang tua dan anggota keluarga, mereka mendidik anak-anak mereka untuk memahami pentingnya kesamaan hak semua orang, yang berbeda suku, ras, agama, keyakinan, budaya, warna kulit, strata sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. | Melalui keteladanan, bimbingan dan dialektika bersama. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak menjadi pribadi yang mudah bergaul, tanpa membedakan etnis, suku, agama dan stratifikasi sosial. 2. Anak tumbuh kembang menjadi pribadi yang humanis; 3. Anak tumbuh kembang menjadi bagian dari pribadi yang mendorong pemenuhan terwujudnya hak dan harkat kemanusiaan |
| 2 | Sekolah | Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal: | Melalui berbagai kebijakan, kurikulum, tata aturan, sistem pengajaran, strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mempunyai konstruk pengetahuan multikultural |

| | | | | |
|---|------------|---|--|---|
| | | Sekolah menanamkan pendidikan nilai-nilai multikultural yang bersifat sistematis, akademik dan terkontrol. | dan pendekatan berbasis nilai-nilai multikultural | yang baik; 2. Peserta didik akan meminimalisir wujudnya prasangka (<i>prejudice reduction</i>); 3. Peserta didik akan mempunyai kesadaran konsep keadilan kesamaan hak, dan nilai-nilai kemanusiaan. |
| 3 | Masyarakat | Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal: Melakukan penyadaran melalui kehidupan nyata betapa pentingnya memandang keragaman manusia tanpa membedakan agama, kepercayaan, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmaniah dan status sosial. | Melalui forum-forum desa, keagamaan, kebijakan/konsesus berbasis multikultural dan menumbuhkan semangat resiliensi warga masyarakat. | 1. Terwujudnya warga masyarakat yang rukun, tenteram dan aman. 2. Terwujudnya tatanan kehidupan <i>civil society</i> yang nyata. 3. Terwujudnya kehidupan keharmonisan masyarakat yang murni, tanpa rekayasa dan berbasis kesadaran atas beragam perbedaan. |

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan multikultural dengan meminjam konsepnya Ki Hadjar Dewantara “*daya dobraknya*” lebih praktis dan mudah dilaksanakan. Jadi, harapan mengembalikan karakter budaya bangsa yang mulai hilang, nampaknya segera nyata. Asalkan saja, semua orang menghendaknya. Karena sebaik apa pun, ide, gagasan, konsep, dan rencana mulia tidak akan berhasil, jika pelakunya (manusia) tidak menginginkan terwujudnya perubahan itu. Bukankah Tuhan semua agama cinta pada kedamaian? Dan Ia pun, akan memudahkan langkah hamba-Nya (manusia) yang ingin merengkuh kedamaian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar pada uraian tersebut, dapat ditarik konklusi sebagai berikut: **Pertama**, melalui pembelajaran multikultural keunikan manusia dengan perbedaan agama, keyakinan, ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang dapat dihargai secara sepadan. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural.

Kedua, konsep pendidikan multikultural Tri Pusat Pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu terobosan yang diharapkan dapat segera mewujudkan percepatan pemahaman dan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Melalui tiga matra pendidikan, 1) Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal, kedua orang tua dan anggota keluarga dapat **mendidik** anak-anak mereka untuk memahami pentingnya kesamaan hak semua orang, yang berbeda suku, ras, agama, keyakinan, budaya, warna kulit, strata sosial dan nilai-nilai kemanusiaan; 2) sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dapat **menanamkan** pendidikan nilai-nilai multikultural yang bersifat sistematis, akademik dan terkontrol; 3) masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal, mampu **menumbuhkan penyadaran** melalui kehidupan nyata, terkait dengan pentingnya memandang keragaman manusia tanpa membedakan agama, kepercayaan, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmaniah dan status sosial.

Saran

Berpijak pada hasil penelitian tersebut di atas, setidaknya ada tiga rekomendasi yang harus segera disikapi, yakni; 1) kepada para orang, hendaknya mereka senantiasa memahami dan memberikan ruang untuk tumbuh kembang terjadinya proses pendidikan multikultural di kehidupan keluarga; 2) kepada sivitas akademika di institusi pendidikan, hendaknya pendidikan multikultural ditetapkan sebagai salah satu kebijakan institusional, mengingat begitu pentingnya pendidikan multikultural itu diletakkan di rahim pendidikan; 3) kepada warga masyarakat dan tokoh masyarakat, hendaknya ruang-ruang kebebasan dalam berpendapat, bersikap, bertindak, dan berkeyakinan terhadap agama diberikan secara luas.

Daftar Pustaka

- Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice" In *Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling-Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- Banks, J.A. 1991. "Multicultural Education: Its Effects on Studies' Racial and Gender Role Attitude" In *Handbook of Research on Social Teaching and Learning*. New York: MacMillan.
- Banks, J.A. 1993. "Multicultural Education: Its Effects on Studies' Racial and Gender Role Attitude" In *Handbook of Research on Social Teaching and Learning*. New York.: MacMillan.
- Banks, J.A. 1994b. *Multicultural Education: Theory and Practice*, 3rd ed. Boston: Allyn and Boston.
- Bennett, C. & Spalding, E. 1992. "Teaching the Social Studies: Multiple Approaches for Multiple Perspectives". In *Theory and Research in Social Education*. XX:3(263-292).
- Byrnes, D.A. 1988. "Children and Prejudice". *Social Education*. 52 (267-271).
- Dufty, D. 1986. "Remodelling Australian Society and Culture: A Study in Education for a Pluralistic Society" . In Modgil, C. & Verma S. & Modgil, S. (eds.) *Multicultural Education, the Interminable Debate*. London: The Falmer Press.
- Gloria, Ladson B & David Gillborn. 2004. *Multicultural Education*. New York, NY: Routledge Falmer.
- Noel, Jana. 2000. *Notable Selection in Multicultural Education*. Sanfransisco CA: McGraw-Hill.
- Zamroni. 2010. "The Implementation of Multicultural Education". A Reader.
- , 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- , 2011. *Dinamika Peningkatan Mutu*. Yogyakarta; Gavin Kalam Utama.